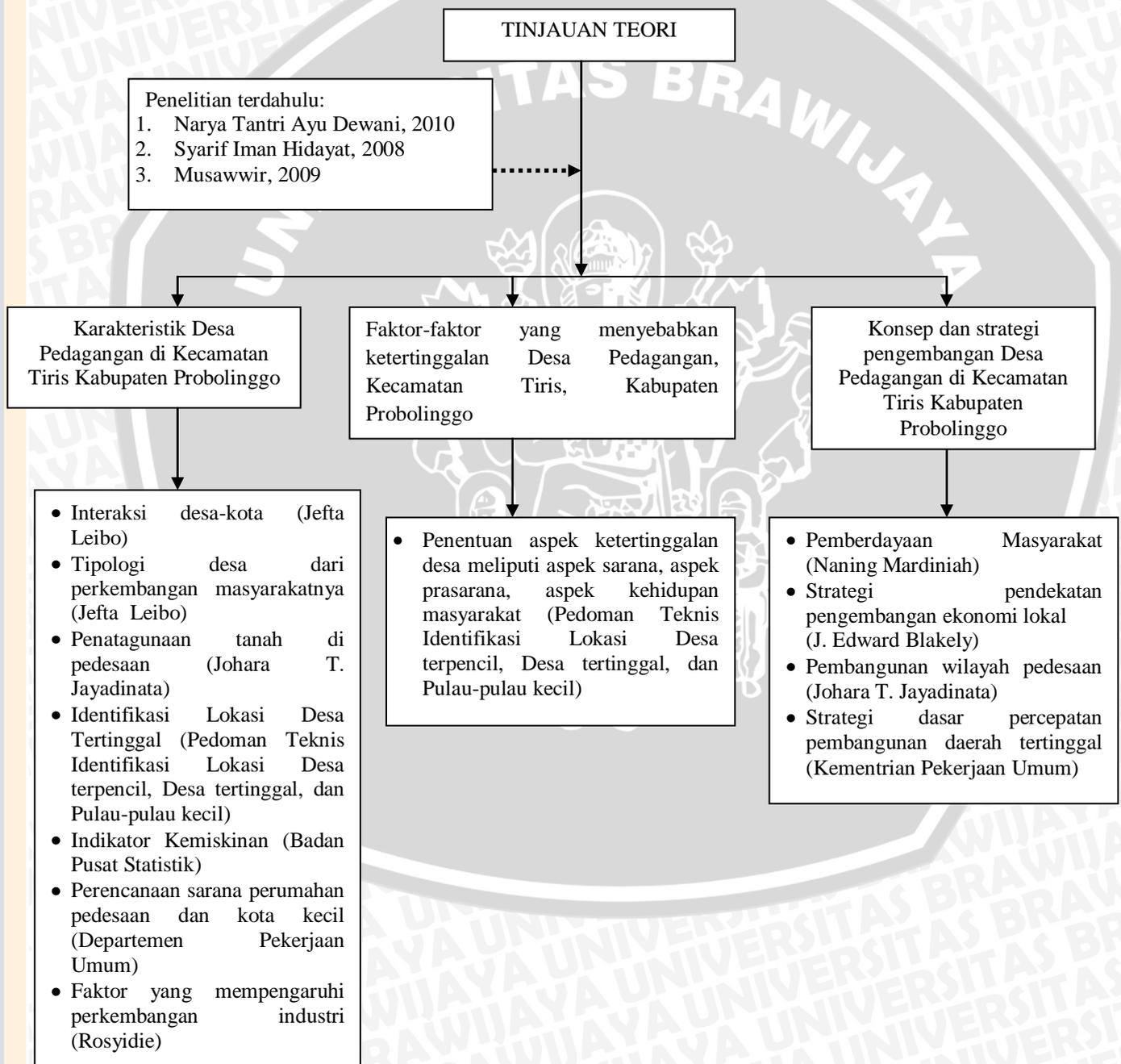


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Tinjauan pustaka yang digunakan dalam setiap rumusan masalah pada penelitian mengenai “Pengembangan Desa Pedagangan Sebagai Desa Tertinggal di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo” dapat dilihat pada kerangka teori (Gambar 2.1)



Gambar 2.1 Kerangka Teori



2.2 Interaksi antara Desa dan Kota

Interaksi dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial, proses ekonomi, budaya dan sebagainya, yang cepat atau lambat dapat menimbulkan suatu kenyataan. Interaksi dapat terjadi karena adanya unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri, maupun yang ada di dalam kota (Leibo, 1995: 31). Oleh karena itu, dapat dikatakan interaksi terjadi karena terdapat unsur yang menyebabkan antara desa dan kota tersebut dapat saling berhubungan. Unsur tersebut tentunya berkaitan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah. Karakteristik kota yang secara umum dapat dilihat sebagai wilayah dengan karakteristik non agraris, tentunya potensi yang dimiliki akan berkaitan dengan aspek non-agraris pula, seperti industri, perdagangan, dan lain-lain. Desa juga memiliki potensi, khususnya yang berhubungan dengan agraris dan kota kurang berpotensi dalam bidang agraris. Oleh karena itu, kota juga membutuhkan desa untuk memenuhi kebutuhannya, begitupun sebaliknya.

Sifat ketergantungan antara desa terhadap kota dapat dijelaskan sebagai berikut (Leibo, 1995: 31-33) :

1. Kota merupakan tempat pemasaran hasil-hasil pertanian, kerajinan, perikanan, serta peternakan dan sekaligus sebagai tempat mereka mendapatkan benda-benda pemuas kebutuhan hidup yang mereka perlukan. Pertama, kota merupakan “*trade center*” dalam artian kota sebagai pasaran hasil produksi desa. Dengan suatu catatan bahwa di sini tidak diperhitungkan desa-desa yang murni, dengan ekonomi rumah tangga tertutup. Kedua, kota dipandang sebagai “*service center*” yaitu sebagai pusat barang-barang konsumsi, dalam hal ini barang jadi.
2. Kota merupakan tempat dimana terdapat sarana-sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh orang-orang desa, terutama dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi (Perguruan Tinggi).
3. Kota sebagai tempat memperoleh lapangan kerja bagi orang desa karena dapat diketahui bahwa karena sempitnya lahan pertanian yang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang cukup besar, mendorong orang desa untuk melakukan mobilitas keluar desa untuk mendapatkan lapangan kerja.

Adapun ketergantungan kota terhadap desa adalah sebagai berikut (Leibo, 1995: 32) :

1. Desa sebagai suplier bahan-bahan atau hasil pertanian, perikanan, kerajinan, ataupun peternakan sebagai kebutuhan masyarakat kota. Hal ini dikarenakan desa merupakan sumber produksinya.

2. Desa sebagai suplier bahan-bahan mentah atau bahan baku, bagi industri atau pabrik-pabrik dan proyek-proyek. Misalnya saja buah-buahan untuk pabrik minuman, kapas untuk industri tekstil, kopra untuk pabrik minyak goreng, ataupun batu-batuan untuk bahan material bagi proyek-proyek (bangunan gedung, jembatan, dan sebagainya).
3. Desa sebagai tempat pemasaran hasil-hasil industri (barang-barang jadi maupun alat-alat mekanisasi pertanian, dan sebagainya).
4. Desa sebagai sumber tenaga kerja bagi industri-industri, pabrik-pabrik, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa antara desa dan kota memiliki hubungan saling ketergantungan. Hal ini berbeda dengan desa tertinggal yang memiliki tingkat ketergantungan relatif kecil terhadap kota. Desa tertinggal tidak dapat berinteraksi secara bebas dengan wilayah perkotaan. Faktor penyebab kondisi tersebut dapat berupa sarana dan prasarana transportasi yang kurang memadai, sehingga menyebabkan wilayah pedesaan kesulitan dalam mendistribusikan hasil produksinya. Selain itu, akibat dari keterbatasan interaksi antara kota dan desa, maka masyarakat desa tidak dapat mengakses sarana perkotaan yang lebih lengkap seperti pendidikan dan perdagangan, sehingga mayoritas penduduk desa mengalami kemiskinan dan keterbelakangan.

2.3 Tinjauan Teori tentang Karakteristik Desa

2.3.1 Pengertian Desa

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. (Undang-undang Penataan Ruang No. 26 Tahun 2007).

Menurut Paul H. Landis dalam Jefta Leibo (1995:6), definisi pedesaan adalah :

- a. Untuk maksud kajian psikologi sosial, pedesaan adalah daerah-daerah dimana pergaulannya ditandai oleh derajat intimitas yang tinggi
- b. Untuk maksud kajian ekonomi, pedesaan itu merupakan daerah dimana pusat perhatian/kepentingan adalah pertanian dalam arti luas.

2.3.2 Penatagunaan Tanah di Pedesaan

Tanah di pedesaan digunakan bagi kehidupan sosial dan kehidupan ekonomi. Kehidupan sosial yang biasanya dilakukan di dalam kampung, seperti berkeluarga, bersekolah, beribadah, berekreasi, dan berolah raga, dan lain sebagainya. Kegiatan ekonomi biasanya dilakukan di luar kampung seperti bertani, berkebun, beternak, memelihara atau menangkap ikan, menebang kayu di hutan, dan sebagainya. Kegiatan ekonomi juga dapat dilakukan di dalam kampung, seperti perindustrian, perdagangan, dan perusahaan jasa lainnya. Jadi, penggunaan tanah di pedesaan adalah untuk perkampungan dalam rangka kegiatan sosial, dan untuk pertanian dalam rangka kegiatan ekonomi. (Jayadinata, 1992:44).

Tanah dapat digunakan bagi pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, perdagangan, industri, dan lain-lain. Dalam tata guna tanah dibicarakan juga penggunaan air dan permukaannya, seperti laut, sungai, dan sebagainya. Adapun penjelasan tentang berbagai penggunaan tanah/lahan di pedesaan yaitu (Jayadinata, 1992:51) :

A. Pertanian

a. Pertanian primitif

1. Pertanian berpindah, ialah perladangan bakar (milpa) yang dewasa ini disebut perladangan liar. Caranya ialah penduduk desa membuka sebagian dari hutan milik desa dengan menebang pohon-pohonnya dan membakarnya.
2. Pertanian primitif yang menetap

b. Pertanian maju

Pertanian yang telah maju dilakukan secara teratur dan dicirikan oleh adanya peralatan yang cukup (cangkul, bajak, traktor kecil), pengairan pemupukan, pemeliharaan benih, tanaman bergilir (*crop rotation*) yang dilakukan terutama pada tanah kering, penyiangan, penumpasan hama, pencegahan kikisan, dan sebagainya. Peralatan yang digunakan dalam pertanian yang telah maju ini dapat menurut teknologi madya dan teknologi maju.

Pertanian jenis ini selalu menetap (*sedentary*). (Jayadinata, 1992:52).

B. Perkebunan

Perkebunan adalah yang bersifat niaga (untuk dijual) karena terdapat surplus.

Perkebunan niaga banyak menggunakan tanah yang luas terjadi dari :

- a. Perkebunan rakyat, yang ditanam sering campuran atau bermacam-macam tanaman, tanahnya kurang dari 100 ha, modalnya kecil, pengerjaannya kurang efisien, karyawannya dari anggota keluarga.
- b. Perkebunan besar, yang diusahakan tanaman sejenis, tanahnya luas sampai puluhan ribu hektar, modalnya besar, tenaga buruh upahan, menggunakan mesin, dan secara hasil guna (efisien). (Jayadinata, 1992:55)
 1. Perkebunan Negara
 2. Perkebunan swasta (nasional dan campuran)

C. Perikanan

Perikanan terdiri dari atas perikanan laut yang ekstraktif dan perikanan darat yang produktif. (Jayadinata, 1992:56):

- a. Perikanan laut umumnya terdiri atas :
 1. Perikanan pantai : perikanan sederhana yang dilakukan dengan pancing atau jala sederhana, tanpa perahu atau dengan perahu layar
 2. Perikanan laut dangkal : perahu layar atau perahu bermotor
 3. Perikanan laut dalam : dengan kapal modern
 4. Perikanan ikan paus, dengan kapal yang merupakan pabrik
- b. Perikanan darat terdiri dari dua macam :
 1. Perikanan dalam kolam, dengan ikan air tawar, terdapat di pedalaman
 2. Perikanan dalam tambak dengan ikan laut (biasanya bandeng), dan dapat juga dengan ikan air darat (tawes atau mujair dan nila), yang terdapat di sepanjang pantai alluvial.

D. Peternakan

Peternakan di Indonesia terdiri dari peternakan hewan besar (sapi, kerbau, kuda), peternakan hewan kecil (biri-biri, kambing), peternakan unggas, dan peternakan lebah dan kelinci. Dalam peternakan terdapat perusahaan peternakan rakyat (dengan modal kecil) dan perusahaan peternakan besar yang komersial (dengan modal besar dan tanah luas) yang merupakan *ranch* dan memerlukan tanah ribuan ha. (Jayadinata, 1992:56)

E. Kehutanan

Umumnya hutan meliputi tanah yang luas adalah kepunyaan negara. Macam hutan dapat berupa :

- a. Cagar alam
- b. Hutan Lindung

- c. Hutan Produksi
- d. Hutan Rekreasi

Dalam penatagunaan tanah, baik untuk kehidupan ekonomi (misalnya dalam pertanian) maupun untuk kehidupan sosial (misalnya untuk perumahan), harus diperhitungkan beberapa unsur alam tertentu seperti ketinggian dan lereng, tata air, dan sebagainya, sehingga terdapat keserasian dalam penatagunaan tanah. Umumnya pola penggunaan tanah dekat kampung lebih intensif, makin jauh dari kampung makin ekstensif pengerjaannya. (Jayadinata, 1992:57)

2.4 Tinjauan Teori tentang Desa Tertinggal

2.4.1 Pengertian Desa Tertinggal

Kementrian Pekerjaan Umum (2007) mendefinisikan bahwa Desa tertinggal sebagai Kawasan Perdesaan yang sarana dan prasarana dasar wilayahnya kurang/tidak ada (tertinggal) sehingga menghambat pertumbuhan/perkembangan kehidupan masyarakatnya dalam bidang ekonomi (kemiskinan) dan bidang pendidikan (keterbelakangan).

2.4.2 Kriteria Aspek Ketertinggalan Desa

Kementrian Pekerjaan Umum dalam Pedoman Teknis Identifikasi Lokasi Desa terpencil, Desa tertinggal, dan Pulau-pulau kecil (2007) mengidentifikasi kriteria aspek ketertinggalan desa dapat dilihat dari beberapa hal :

1. Daerah perdesaan (unit administratif desa)
2. Sarana wilayah kurang/tidak ada
 - a. Sarana ekonomi (pasar, pertokoan, industri)
 - b. Sarana sosial (kesehatan dan pendidikan)
 - c. Sarana transportasi (terminal, stasiun, bandara)
3. Prasarana dasar wilayah kurang/tidak ada :
 - a. Air Bersih
 - b. Listrik
 - c. Irigasi
4. Perekonomian masyarakat rendah (miskin/pra sejahtera)
5. Tingkat Pendidikan Rendah (terbelakang/pendidikan kurang dari 9 tahun)
6. Produktivitas masyarakat rendah (pengangguran pada usia produktif)

Adapun penetapan parameter sebagai indikator kuantitatif untuk tiap kriteria yang bersifat kualitatif, yaitu :

1. Kawasan permukiman
 - Kriteria : kawasan pedesaan
Parameter : unit administrasi desa
2. Sarana Wilayah
 - Kriteria : sarana ekonomi (pasar, pertokoan, PKL)
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
 - Kriteria : sarana industri (industri rumah tangga, industri menengah, industri besar)
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
 - Kriteria : sarana kesehatan (RSD, puskesmas, Pustu)
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
 - Kriteria : sarana pendidikan (TK, SD, SMP, SMU)
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
 - Kriteria : sarana transportasi (Terminal, Stasiun)
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
3. Prasarana dasar wilayah
 - Kriteria : jaringan air bersih
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
 - Kriteria : jaringan listrik
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
 - Kriteria : jaringan irigasi
Parameter : pelayanan terhadap luas kawasan kurang dari 25 %
4. Kondisi Kehidupan Masyarakat
 - Kriteria : perekonomian masyarakat
Parameter : jumlah penduduk miskin lebih dari 50 %
 - Kriteria : tingkat pendidikan
Parameter : tingkat pendidikan penduduk kurang dari SMP lebih dari 50%
 - Kriteria : produktivitas masyarakat
Parameter : penduduk menganggur lebih dari 50 %

2.4.3 Faktor Penyebab dan Sebaran desa tertinggal

Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, penyebab ketertinggalan suatu daerah, karena beberapa faktor penyebab, antara lain :

- (1) **Geografis.** Umumnya secara geografis daerah tertinggal relatif sulit dijangkau karena letaknya yang jauh di pedalaman, perbukitan/pegunungan, kepulauan, pesisir, dan pulau-pulau terpencil atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi.
- (2) **Sumberdaya Alam.** Beberapa daerah tertinggal tidak memiliki potensi sumberdaya alam, daerah yang memiliki sumberdaya alam yang besar namun lingkungan sekitarnya merupakan daerah yang dilindungi atau tidak dapat dieksploitasi, dan daerah tertinggal akibat pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan.
- (3) **Sumberdaya Manusia.** Pada umumnya masyarakat di daerah tertinggal mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan yang belum berkembang.
- (4) **Prasarana dan Sarana.** Keterbatasan prasarana dan sarana komunikasi, transportasi, air bersih, irigasi, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan lainnya yang menyebabkan masyarakat di daerah tertinggal tersebut mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- (5) **Daerah Rawan Bencana dan Konflik Sosial.** Seringnya suatu daerah mengalami bencana alam dan konflik sosial dapat menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial dan ekonomi.
- (6) **Kebijakan Pembangunan.** Suatu daerah menjadi tertinggal dapat disebabkan oleh beberapa kebijakan yang tidak tepat seperti kurang memihak pada pembangunan daerah tertinggal, kesalahan pendekatan dan prioritas pembangunan, serta tidak dilibatkannya kelembagaan masyarakat adat dalam perencanaan dan pembangunan.

Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/I/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, sebaran daerah tertinggal secara geografis digolongkan menjadi beberapa kelompok, antara lain:

- (1) Daerah yang terletak di wilayah pedalaman, tepi hutan, dan pegunungan yang pada umumnya tidak atau belum memiliki akses ke daerah lain yang relatif lebih maju;
- (2) Daerah yang terletak di pulau-pulau kecil, gugusan pulau yang berpenduduk dan memiliki kesulitan akses ke daerah lain yang lebih maju;

- (3) Daerah yang secara administratif sebagian atau seluruhnya terletak di perbatasan antarnegara baik batas darat maupun laut;
- (4) Daerah yang terletak di wilayah rawan bencana alam baik gempa, longsor, gunung api, maupun banjir.
- (5) Daerah yang sebagian besar wilayahnya berupa pesisir.

2.5 Tinjauan Teori tentang Aspek Ketertinggalan Desa

2.5.1 Sarana Wilayah

A. Sarana Ekonomi

Sarana ekonomi dalam hal ini terdiri dari toko dan warung. Berdasarkan Standar Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil Tahun 2000 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sarana perdagangan dibagi menjadi :

1. Toko

Berfungsi untuk menjual barang-barang keperluan sehari-hari dengan jenis yang beragam. Lokasi di pusat lingkungan yang mudah dicapai tanpa menyeberang. Minimum didukung oleh 2.500 penduduk

2. Warung

Berfungsi untuk menjual barang kebutuhan masyarakat sehari-hari (sabun, gula, rempah-rempah, teh, kopi, dan lain-lain). Lokasi di pusat lingkungan yang mudah dicapai dengan radius maksimum 500 meter. Minimum didukung oleh 250 penduduk.

B. Sarana Industri

Industri dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri nasional yang tangguh ditujukan untuk mencakup kemampuan produksi nasional di semua sektor (primer, sekunder, dan tersier), namun lingkup kebijakan yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden ini dibatasi untuk sektor Industri Pengolahan/manufaktur Non-Migas, beserta sektor Jasa Industri yang sangat erat terkait. Sektor Industri Migas diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya alam, sedangkan sektor Jasa Industri lainnya diatur tersendiri dalam rezim peraturan perundang-undangan di bidang sektoral.

Adapun klasifikasi industri menurut Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan banyaknya pekerja yaitu terdiri dari (BPS, 1999: 250):

- a. Industri besar adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih
- b. Industri sedang adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 20-99 orang
- c. Industri kecil adalah perusahaan yang mempunyai pekerja 5-19 orang
- d. Industri rumah tangga adalah perusahaan yang mempunyai pekerja antara 1-4 orang

Berdasarkan keseragaman penggunaan teknologi dan fungsi produk, Departemen Perindustrian mengelompokkan industri kecil menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :

a. Industri Kecil Pangan

Yaitu kegiatan industri kecil yang menghasilkan barang-barang konsumsi. Misalnya industri kecil kerupuk, industri kecil tahu tempe, industri kecil keripik dan lain-lain.

b. Industri Kecil Sandang dan Kulit

Yaitu kegiatan industri kecil yang menghasilkan sandang atau pakaian dan kerajinan yang berasal dari kulit. Misalnya industri kecil sulaman, tenun, konveksi, batik, sepatu, tas dan lain-lain.

c. Industri Kecil Kimia dan Bahan Bangunan

Yaitu kegiatan industri kecil yang menghasilkan/aktivitas produknya adalah bahan kimia dan bahan bangunan. Termasuk dalam industri ini, misalnya industri kecil batu bata, industri genteng dan lain-lain.

d. Industri Kecil Kerajinan dan Umum

Yaitu kegiatan industri kecil yang menghasilkan produk berupa kerajinan rumah tangga atau kerajinan tangan. Misalnya industri kecil anyaman, industri keramik, industri kecil ukiran kayu dan lain-lain.

e. Industri Kecil Logam

Yaitu kegiatan industri kecil yang khusus menghasilkan produk dari logam, misalnya industri kecil pandai besi, industri kecil cor logam, bengkel las dan lain-lain.

Secara garis besar faktor yang mempengaruhi perkembangan industri dapat dibedakan menjadi dua yaitu (Rosyidie, 1987:40-49):

a. **Faktor Internal**

Merupakan faktor yang menyangkut kelancaran proses produksi, meliputi:

1. Bahan Baku

Bahan baku adalah salah satu faktor produksi yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Keberlangsungan dari suatu industri akan banyak bergantung pada kontinuitas pasokan bahan baku sebagai salah satu industri. Tak ada barang yang dapat dibuat jika tidak ada bahan bakunya. Semakin mudah memperoleh bahan baku (dengan harga yang murah, mutu yang baik, dan dalam jumlah yang cukup, serta dalam waktu yang relatif cepat) dapat memperlancar proses produksi. Hal yang perlu diperhatikan di dalam karakteristik bahan baku berkaitan dengan lokasi industri adalah asal, jenis, jumlah, dan harga bahan baku.

2. Modal

Modal merupakan salah satu bentuk investasi awal yang menjadi penggerak di dalam suatu industri. Ketersediaan modal yang memadai dapat memberikan jaminan kepada kontinuitas faktor produksi yang lain. Jumlah modal yang dimiliki oleh suatu industri dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Kelancaran dalam memperoleh bahan baku, penggajian buruh dan perubahan-perubahan (pembaharuan) dalam teknologi sangat dipengaruhi oleh besarnya modal yang dimiliki oleh masing-masing pengusaha. Modal untuk mendirikan sebuah industri dapat berasal dari modal pribadi maupun modal yang berasal dari pinjaman pihak lain, seperti badan pemberi pinjaman, ataupun bank.

3. Tenaga Kerja

Tingkat pendidikan dan keterampilan, serta keahlian tenaga kerja suatu industri dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk baik secara langsung maupun tak langsung. Kualitas dari pengusaha juga mempengaruhi perkembangan industri yang dikelolanya. Orientasi industri juga dapat mengarah kepada tenaga kerja seiring dengan banyaknya faktor produksi yang digunakan. Lama usaha juga ikut mempengaruhi kualitas dari tenaga kerja yang bersangkutan. Pada umumnya industri yang banyak berorientasi kepada tenaga kerja adalah industri-industri yang tidak banyak menggunakan peralatan modern atau lebih bersifat padat karya seperti industri rokok dan industri tekstil.

4. Peralatan/Teknologi

Perubahan ke arah kemajuan dalam teknik produksi mempengaruhi masa depan perkembangan industri. Kemajuan dalam teknik industri dapat meningkatkan kemampuan industri yang bersangkutan untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih baik dan dalam jumlah yang cukup, sehingga akhirnya dapat dijual dengan

harga yang lebih mampu bersaing. Beberapa faktor yang mempengaruhi di dalam karakteristik teknologi/peralatan yang berkaitan dengan lokasi industri adalah jenis, jumlah, dan harga peralatan. Faktor lain yang perlu diperhatikan dalam hal peralatan terkait dengan lokasi industri adalah harga peralatan atau mesin yang digunakan.

5. Pemasaran

Menurut Kotler (1997: 57), pemasaran diartikan sebagai perencanaan dan pelaksanaan konsep distribusi barang. Pelaksanaan konsep ini melalui proses sosial dan manajerial dimana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan. Hal itu dapat melalui kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan kebutuhan barang dan jasa, baik kepada konsumen saat ini maupun konsumen potensial.

- **Saluran Distribusi Pemasaran**

Saluran distribusi pemasaran merupakan saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang hasil produksi dari produsen sampai ke konsumen. Pola saluran distribusi pemasaran dapat dibedakan menjadi saluran langsung, dimana hasil produksi dijual langsung oleh produsen kepada konsumen, serta saluran tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi :

- a. Produsen – pengecer – konsumen
- b. Produsen – pedagang besar atau menengah – pengecer – konsumen
- c. Produsen – pedagang besar – pedagang menengah – pengecer – konsumen

Model pemasaran yang banyak dilakukan oleh usaha kecil di Indonesia adalah pemasaran bersama dengan sasaran pasar yang telah ada dan tanpa biaya pemasaran, melainkan dengan biaya transport atau pengangkutan. Hal dikarenakan pasar konsumen telah ada jauh sebelum mereka berproduksi, dan bahkan ada pula yang memanfaatkan peluang pasar sebagai sarana untuk mendapatkan kredit permodalan dari investor atau bank (Kotler & Amstrong, 1997: 58).

- **Promosi**

Promosi adalah usaha perusahaan untuk mempengaruhi dengan merayu calon pembeli, melalui pemakaian segala unsur acuan pemasaran. Kebijakan promosi ini tidak terlepas dari kebijakan terpadu dari acuan atau bauran pemasaran (*marketing mix*), sehingga keberhasilan/ keefektifannya tergantung pada kebijakan pemasaran lainnya, sebagai satu kesatuan. Variabel promosi meliputi:

- a. Periklanan (*advertising*)
- b. Promosi penjualan (*sales promotion*)
- c. Publisitas (*publicity*)

Promosi digunakan untuk memberikan informasi untuk orang-orang tentang produk dan mempersuasi pembeli atau target pasar, saluran distribusi dan publik untuk membeli mereknya. Tiap bentuk promosi memiliki kekuatan dan kelemahannya sehingga diperlukan strategi yang terintegrasi untuk dapat meningkatkan kekuatan masing-masing komponen dalam berpromosi dan mendesain bauran promosi yang efektif dan efisien (Kotler, 1997: 45).

6. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan wadah berinteraksinya berbagai elemen produksi yang saling terkait, sehingga dapat terbentuk efisiensi kolektif. Kelembagaan meliputi seluruh elemen dalam suatu proses produksi mulai dari bahan baku, pemasaran, teknologi dan inovasi, informasi, keuangan, maupun fasilitas penunjang lainnya. Selain organisasi yang terkait dengan proses produksi, pemerintah juga memiliki peranan yang tidak kalah penting terutama sesuai dengan fungsinya untuk mengeluarkan kebijakan publik yang harus mampu mengakomodir kebutuhan industri kecil.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang mendukung faktor internal dalam membantu kelancaran suatu proses produksi. Faktor-faktor eksternal industri meliputi (Rosidie, 1987:82-88):

1. Kondisi wilayah perdesaan

Berdasarkan lokasinya terhadap kota kondisi wilayah perdesaan dibedakan menjadi:

➤ Desa di dalam kota

Desa yang terletak di dalam kota merupakan bagian dari kota, tetapi belum menunjukkan ciri-ciri kota. Ciri-cirinya adalah daerah kumuh, permukiman liar, daerah yang belum memperoleh fasilitas pelayanan kota, penduduk bekerja di sektor informal.

➤ Desa di pinggiran kota

Desa di pinggiran kota merupakan desa yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah administrasi kota dan merupakan daerah peralihan (transisi) antara kehidupan desa dengan kota. Hubungan dengan daerah lain ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fisik, ekonomi, sosial serta keterkaitan administratif. Desa ini berfungsi sebagai penyangga dari kota di dekatnya maupun sebagai penyangga pertumbuhan antara kota

yang satu dengan kota yang lain dan mengurangi konsentrasi penduduk ke daerah perkotaan.

➤ Desa di daerah perdesaan

Desa di daerah perdesaan sebagian tenaga kerjanya mempunyai kualitas relatif rendah dan bekerja di sektor pertanian, namun telah menunjukkan adanya penganekaragaman mata pencaharian di sektor perdagangan, pemerintahan, jasa dan industri. Pola pemanfaatan sumber daya alam masih sangat sederhana dengan barang-barang yang dipasarkan ke kota dalam keadaan belum diolah (bahan mentah) sehingga harganya relatif rendah.

➤ Desa di pedalaman/terpencil

Desa pedalaman hanya mengutamakan pusat lokal yang ada dan seringkali mengadakan interaksi dengan desa terdekat yang sama-sama merupakan desa terpencil. Interaksi dengan wilayah lain sangat terbatas karena terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan.

2. Keterkaitan

Keterkaitan dengan sesama industri maupun industri menengah dan besar atau dengan sektor kegiatan lainnya (sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, tenaga kerja, pendidikan, jasa) baik berada di perdesaan maupun di perkotaan mempengaruhi perkembangan industri. Keterkaitan ruang dapat berupa keterkaitan fisik (jaringan jalan yang menghubungkan desa dengan daerah lainnya), keterkaitan ekonomi (keterkaitan produksi, pemasaran), keterkaitan pergerakan penduduk (migrasi), keterkaitan teknologi, keterkaitan interaksi sosial, keterkaitan politik, administrasi dan organisasi.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas terhadap bahan baku, konsumen, dan pasar mempengaruhi proses produksi. Jaringan jalan merupakan faktor penunjang dalam pertumbuhan dan perkembangan kegiatan perekonomian di perdesaan, sehingga jaringan jalan dan perangkutan merupakan faktor yang besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan industri.

4. Kebijakan Pemerintah

Kemudahan prosedur bagi pengusaha dalam melaksanakan seluruh rangkaian produksi seperti kebijakan pemerintah dalam membantu memperoleh bahan baku, modal, dan teknologi, kebijakan dalam melindungi dan membantu pemasaran produk industri juga sangat mempengaruhi perkembangan industri.

5. Faktor Kebudayaan

Sikap keagamaan dan kebudayaan mempengaruhi sikap dan tindak lanjut masyarakat. Masyarakat pada daerah tertentu lebih menaruh minat pada kehidupan mistik, sehingga yang diperhatikan adalah ketenangan batin, keselarasan lingkungan serta penyesuaian diri dengan masyarakat, sehingga mutu dan pola produk juga dipengaruhi oleh pola budaya mereka.

C. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan dalam hal ini terdiri dari balai pengobatan, Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), puskesmas pembantu, puskesmas, praktek dokter, apotik, dan posyandu. Berdasarkan Standar Pedoman Teknis Pembangunan dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil Tahun 2000 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sarana kesehatan dibagi menjadi :

1. Balai pengobatan

Fungsi utama sarana ini adalah memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan yang titik beratnya adalah penyembuhan (*currative*) tanpa perawatan/berobat dan pada waktu-waktu tertentu untuk vaksinasi (*preventif*). Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 3.000 jiwa.

2. Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA)

Fungsi utama dari sarana ini untuk melayani ibu-ibu sebelum pada waktu dan sesudah melahirkan serta melayani anak-anak usia sampai dengan 6 tahun. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 jiwa.

3. Puskesmas pembantu

Berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan (penyembuhan, pencegahan, dan pendidikan), juga untuk memantau seluruh kondisi kesehatan lingkungan. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 30.000 jiwa.

4. Puskesmas

Berfungsi sama dengan puskesmas dan balai pengobatan di lingkungan, hanya skala pelayanannya lebih luas. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 120.000 jiwa.

5. Praktek dokter

Berfungsi untuk memberikan jasa pelayanan kesehatan masyarakat bagi penyembuhan dan pencegahan. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 5.000 jiwa.

6. Apotik

Berfungsi untuk melayani penduduk dalam penyediaan obat. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 10.000 jiwa.

7. Posyandu

Posyandu berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal penyembuhan (*currative*) tanpa pencegahan, pada waktu tertentu juga memberikan vaksinasi (*preventive*). Minimum penduduk pendukung sarana ini adalah 2.000 jiwa.

D. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan dalam hal ini terdiri dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Berdasarkan Standar Pedoman Teknis Pembangunan dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil Tahun 2000 oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, sarana pendidikan dibagi menjadi :

1. Taman Kanak-Kanak

TK adalah sarana pendidikan yang paling dasar yang diperuntukkan bagi anak-anak usia 5-6 tahun. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1000 jiwa.

2. Sekolah Dasar (SD)

SD adalah sekolah untuk anak-anak usia antara 6-12 tahun. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 1.600 jiwa.

3. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah (SMP)

SMP adalah sekolah untuk melayani anak-anak lulusan SD. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 4.800 jiwa.

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)

SMA adalah sekolah yang diperuntukkan bagi lulusan SLTP. Minimum penduduk yang dapat mendukung sarana ini adalah 6.000 jiwa.

E. Sarana Transportasi

Transportasi merupakan pergerakan barang atau manusia dalam dimensi ruang, waktu, dan nilai. Pergerakan barang atau manusia tersebut belum bisa berlangsung tanpa adanya sarana dan prasarana yang mendukungnya, maka pendekatan sistem lebih tepat digunakan dalam memahami transportasi (Stopher dan Meyburg dalam Arif, 1978:8). Sistem transportasi merupakan gabungan elemen-elemen atau komponen-komponen yaitu prasarana (jalan dan terminal), sarana (kendaraan), dan sistem pengoperasian (yang mengkoordinasikan komponen prasarana dan sarana (Miro, 1997).

Pergerakan lalu lintas timbul karena adanya proses pemenuhan kebutuhan. Pergerakan terjadi karena adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi oleh suatu tempat. Setiap tata guna lahan atau sistem kegiatan mempunyai suatu jenis kegiatan tertentu yang akan membangkitkan pergerakan dan akan menarik pergerakan dalam proses pemenuhan kebutuhan. Sistem tersebut merupakan sistem pola kegiatan tata guna lahan yang terdiri dari pola kegiatan sosial, ekonomi, kebudayaan dan lain-lain. Interaksi yang terjadi antara sistem kegiatan dengan sistem jaringan menghasilkan manusia dan/atau barang dalam bentuk pergerakan kendaraan dan/atau orang (pejalan kaki) (Tamin, 2000:28).

Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup tertuang dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh penduduk seperti aktivitas bekerja, sekolah, olahraga, belanja, dan bertamu yang berlangsung di atas sebidang tanah (kantor, pabrik, pertokoan, rumah, dan lain-lain). Potongan lahan ini biasanya disebut tata guna lahan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan antar tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sistem jaringan transportasi (misalnya berjalan kaki atau naik angkutan umum). Hal ini menimbulkan perjalanan arus manusia, kendaraan, dan barang (Tamin,2000:30).

Menurut Martin .B. dalam Warpani menjelaskan bahwa terdapat sepuluh faktor yang menjadi peubah penentu yang dapat diidentifikasi dan secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan parameter dalam menentukan besarnya pergerakan yang mempengaruhi penggunaan sarana perangkutan yaitu: (1) maksud perjalanan, (2) penghasilan keluarga, (3) pemilikan kendaraan, (4) guna lahan di tempat asal, (5) jarak dari pusat kegiatan kota, (6) jauh perjalanan, (7) moda perjalanan, (8) penggunaan kendaraan, (9) guna lahan di tempat tujuan, (10) saat. (Martin,B.dalam Warpani,1990:111).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sarana transportasi dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain yaitu :

1. Sistem aktivitas yang dipengaruhi oleh jenis guna lahan
2. Ketersediaan jaringan jalan sebagai prasarana transportasi
3. Sistem pergerakan penduduk

2.5.2 Prasarana Wilayah

A. Prasarana Air Bersih

Menurut Suripin (2002), yang dimaksud air bersih yaitu air yang aman (sehat) dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang segar. Menurut Kepmendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum menjelaskan bahwa perhitungan cakupan pelayanan air bersih sangat didasari pada kondisi penduduk yang ada pada wilayah tersebut, khususnya jumlah penduduk yang terlayani dan jumlah penduduk secara keseluruhan. Jumlah penduduk terlayani ialah jumlah orang yang sudah mendapat pelayanan jaringan prasarana air bersih. sedangkan jumlah penduduk secara keseluruhan ialah jumlah penduduk dalam wilayah studi.

Persepsi masyarakat dalam menilai prasarana lingkungan selalu berubah sejalan dengan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut. Dan yang umum terjadi, semakin tinggi pendidikan dan pendapatan seseorang, akan semakin tinggi pula tuntutan atas kondisinya (Budiharjo, 1991:61). Untuk pelayanan air bersih yang optimal, yang berarti tingkat akses tinggi dimana air yang digunakan masyarakat harus langsung dialirkan kedalam rumah. Karena semakin jauh masyarakat mengakses air bersih berarti semakin buruk akses air bersih bagi masyarakat tersebut (Howard dan Bartram, 2003).

Menurut Ditjen Cipta Karya (1997:142), salah satu faktor-faktor yang sangat dominan dan sering menjadi persoalan dalam air bersih adalah sumber air baku seperti mata air dan air tanah, kualitas dan kuantitasnya semakin menurun dan jaraknya semakin jauh dari daerah pelayanan (aksesibilitas).

Menurut Catanese, Anthony J dan James C.S dalam Hakim, 2010 mengatakan bahwa keberadaan prasarana mempunyai dampak cukup besar pada mutu kehidupan masyarakat, pertumbuhan dan prospek ekonominya. Pada kenyataan dilapangan sekarang ini banyak masyarakat yang belum sadar atas peran prasarana tersebut, dimana dapat dilihat dengan banyak prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang dibangun dengan biaya yang cukup besar oleh pemerintah tetapi tidak mendapat perhatian dari masyarakat dalam pemeliharaannya. Keberadaan prasarana berfungsi untuk pengembangan dan peningkatan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Dalam pengembangan wilayah, kegagalan pembangunan prasarana permukiman lebih disebabkan karena tidak adanya keterlibatan masyarakat sebagai pengguna prasarana

tersebut dalam hal perumusan tujuan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemeliharaan.

Berdasarkan hasil penelitian Prawoko, 2008 bahwa salah satu faktor yang berpengaruh dalam pelayanan air bersih oleh PDAM yaitu faktor persebaran permukiman. Faktor persebaran permukiman pada daerah penelitian yang random sehingga jarak antar desa cukup jauh. Hal ini akan mengakibatkan semakin panjang pipa yang harus dipasang karena pemasangan pipa harus mengikuti jaringan jalan yang ada. Semakin jauh dari jaringan pipa utama maka biaya yang harus dikeluarkan akan semakin banyak.

Berdasarkan penjelasan teori di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang mempengaruhi penyediaan atau pelayanan air bersih yaitu :

1. Tingkat pendidikan masyarakat
2. Tingkat pendapatan masyarakat
3. Akses terhadap air bersih
4. Ketersediaan sumber air baku
5. Lokasi permukiman
6. Partisipasi masyarakat

B. Prasarana Listrik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Pembangunan ketenagalistrikan bertujuan untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, dan harga yang wajar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Standar Pedoman Teknis Pembangunan Perumahan dan Sarana Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Kota Kecil Tahun 2000 oleh Dinas Pekerjaan Umum, meskipun di banyak pedesaan permintaan listrik masih rendah, standar perencanaan fasilitas listrik harus ada. Faktor yang terpenting adalah permintaan rata-rata perkapita, per kk dan permintaan sektor pertanian (irigasi), industri, serta fasilitas umum (penerangan jalan, penyediaan air). Jumlah permintaan berbeda tergantung tingkat pusat pedesaan. Sumber listrik pun berbeda-beda, yang mana yang paling ekonomis untuk masing-masing pusat pedesaan. Harus ditegaskan bahwa penyediaan listrik di kawasan pedesaan, terutama untuk keperluan domestik normalnya memerlukan subsidi yang tidak sedikit. Tujuan utama dari pengadaan listrik di pedesaan adalah untuk membantu

pembangunan negara, menyamaratakan keuntungan peradaban moderen, kultur, sosial, ekonomi dengan adanya pembangunan saluran listrik antar desa dan kota.

C. Prasarana Irigasi

Irigasi secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mendapatkan air guna menunjang kegiatan pertanian, dimana tujuan mendapatkan air tersebut dilakukan dengan usaha pembuatan bangunan dan jaringan saluran untuk membawa dan membagi air secara teratur ke petak-petak yang sudah dibagi. Sumber air untuk irigasi dapat berasal dari berbagai jenis antara lain air hujan, air sungai, maupun air tanah (www.jeisenpailalah.wordpress.com).

Bentuk pertanian bermacam-macam, terdiri dari yaitu :

- a. Sawah adalah bentuk pertanian lahan basah karena menggunakan banyak air dalam kegiatan pertaniannya terutama pada awal kegiatan penanaman. Macam-macam sawah di Indonesia :
 - Sawah Irigasi, adalah sawah dengan pengairan yang teratur
 - Sawah Lebak, adalah sawah yang terletak pada dataran banjir
 - Sawah Tadah hujan, adalah sawah yang pengairannya dari air hujan
 - Sawah Pasang Surut, adalah sawah yang terletak di muara sungai/tepi pantai
- b. Tegalan adalah lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, seperti padi ladang, palawija, dan hortikultura. Tegalan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah. Tegalan sangat tergantung pada turunnya air hujan. Tegalan biasanya diusahakan pada daerah yang belum mengenal sistem irigasi atau daerah yang tidak memungkinkan dibangun saluran irigasi. Permukaan tanah tegalan tidak selalu datar. Pada musim kemarau keadaan tanahnya terlalu kering sehingga tidak ditanami. Tanaman utama di lahan tegalan adalah jagung, ketela pohon, kedelai, kacang tanah, dan jenis kacang-kacangan untuk sayur. Tanaman padi yang ditanam pada tegalan hanya panen sekali dalam satu tahun dan disebut padi gogo. Selain itu tanah tegalan dapat ditanami kelapa, buah-buahan, bambu, dan pohon untuk kayu bakar. Cara bertani di lahan tegalan menggunakan sistem tumpangsari, yaitu dalam sebidang lahan pertanian ditanami bermacam-macam tanaman. Sistem tumpangsari sangat menguntungkan karena dapat mencegah terjadinya kegagalan panen.
- c. Ladang berpindah adalah kegiatan pertanian yang dilakukan dengan cara berpindah-pindah tempat. Ladang dibuat dengan cara membuka hutan atau semak belukar. Pohon atau semak yang telah ditebang/dibabat setelah kering kemudian

dibakar. Setelah hujan tiba, ladang kemudian ditanami dan ditunggu sampai panen tiba. Setelah ditanami 3 – 4 kali, lahan kemudian ditinggalkan karena sudah tidak subur lagi. Kejadian ini berlangsung terus menerus, setelah jangka waktu 10 - 20 tahun, para petani ladang kembali lagi ke ladang yang pertama kali mereka buka. Sistem ladang berpindah ini dapat mengakibatkan dampak negatif, diantaranya :

- Mengurangi luas hutan
 - Kerusakan hutan
 - Tanah menjadi tandus / lahan kritis
 - Tanah mudah tererosi
 - Kebakaran hutan
 - Pencemaran udara
 - Banjir
- d. Pekarangan adalah bentuk pertanian dengan memanfaatkan pekarangan/ halaman sekitar rumah. Biasanya lahan pertanian pekarangan diberi batas/pagar. Jenis tanaman yang diusahakan pada lahan ini antara lain jagung, kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran, kelapa dan buah-buahan (www.e-dukasi.net).

Menurut Swain et al. dalam Faesal dan Shuryawati (2005) dijelaskan bahwa kendala umum yang dihadapi dalam berusaha tani pada lahan sawah tadah hujan di Asia adalah iklim, lahan tidak subur, dan kurangnya varietas yang dapat beradaptasi dengan ekosistem tersebut. Hal yang sama dihadapi petani dalam pengelolaan usaha taninya yaitu (a) penguasaan teknologi produksi masih minim, (b) keterbatasan air pengairan, (c) keterbatasan modal, (d) pemilikan lahan yang sempit, dan (e) tidak ada jaminan pasar produk yang dihasilkan.

Menurut Ariyanto, 2007 terdapat beberapa aspek yang berpengaruh terhadap sistem jaringan irigasi yang dibangun baik sistem sederhana, sistem semi teknis, maupun sistem teknis yaitu :

1. Aspek budaya : aspek budaya merupakan aspek yang paling menentukan karakteristik dan sifat dari sistem jaringan. Aspek ini tidak hanya berkaitan dengan masalah teknis tetapi seringkali berkaitan dengan masalah tradisi atau bahkan religi/keyakinan.
2. Aspek sosial ekonomi : Seperti aspek budaya, aspek ini hampir sama karena juga berkaitan dengan budaya masyarakat. Hanya saja aspek ini lebih ditekankan pada nilai-nilai sosial ekonomi seperti mata pencaharian masyarakat setempat,

pendapatan masyarakat setempat, serta kebiasaan masyarakat setempat menilai suatu materi.

3. Aspek bukan manusia : aspek bukan manusia merupakan aspek di luar campur tangan manusia yang akan mempengaruhi sistem irigasi, seperti kondisi sumber daya yang ada atau kondisi daerah setempat.

Berdasarkan teori di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek yang mempengaruhi pelayanan irigasi yaitu :

1. Jenis komoditi yang ditanam
2. Penggunaan teknologi/pengetahuan
3. Kebiasaan masyarakat bercocok tanam

2.5.3 Sosial Ekonomi Masyarakat

A. Perekonomian Masyarakat

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret.

Indikator kemiskinan dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Tahun, 2008, sebagai berikut :

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain
5. Sumber Penerangan Rumah Tangga tidak menggunakan listrik
6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai /air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam satu kali dalam seminggu
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ poliklinik
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0.5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD
14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), seperti: Sepeda motor (kredit/ non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

B. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan adalah seseorang dalam mengikuti pelajaran dalam suatu sekolah sampai lulus tertinggi baik sekolah negeri atau swasta. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya. Dalam pengertian sehari-hari pendidikan adalah upaya sadar seseorang untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, serta memperluas wawasan. Pada dasarnya pendidikan yang diupayakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat dan keluarga. Secara nasional pendidikan yang menekankan pengembangan sumber daya manusia menjadi tanggung jawab Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (www.e-dukasi.net).

Beberapa faktor penyebab rendahnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia adalah (www.e-dukasi.net):

1. Pendapatan perkapita penduduk rendah, sehingga orang tua/penduduk tidak mampu sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat.
2. Masih rendahnya kesadaran penduduk terhadap pentingnya pendidikan, sehingga banyak orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya.

Indikator ini merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Pada umumnya indikator input lebih banyak diperoleh melalui sumber data pembuat program pendidikan dan instansi teknis terkait. Tetapi sumber data dari sensus atau survei dengan pendekatan rumah tangga masih bisa menginformasikan keterangan dasar. Beberapa indikator yang terkait dengan pendidikan yaitu persentase rumah tangga yang mempunyai jarak sama dengan atau kurang dari 5 km ke SD/SLTP/SMP. Indikator ini menunjukkan kedekatan jarak antara rumah dengan gedung sekolah (SD/SLTP/SMP). Jarak 5 km dianggap batas

maksimum (terjauh) suatu jarak yang disebut dekat dan mudah dijangkau. (www.yapenwaropenkab.bps.go.id)

Menurut Mudjito dalam Akira, 2009 menjelaskan bahwa pandangan masyarakat desa di daerah tertinggal pun cenderung lebih berorientasi pada hal materiil, yaitu lebih menyukai jika anak-anaknya bekerja membantu orang tua daripada harus belajar di sekolah. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat desa di daerah tertinggal sulit melepaskan anak-anak mereka untuk menuntut ilmu di tempat yang jauh. Mereka lebih suka melihat anak-anak mereka di rumah membantu orang tua di ladang, tambak atau sawah. Paradigma seperti inilah yang telah ada dalam diri mereka sejak lama dan sulit untuk dirubah. Bagi masyarakat pedalaman, yang berpencar, pendidikan belum merupakan prioritas karena anak-anak masih dipandang sebagai alat produksi bagi keluarga.

Berdasarkan tinjauan teori di atas dapat disimpulkan bahwa aspek yang mempengaruhi tingkat pendidikan yaitu :

1. Keterbatasan biaya pendidikan
2. Jarak menuju sekolah SD/SMP/SMA
3. Pola pikir masyarakat tentang pendidikan

C. Produktivitas Masyarakat

Produktivitas mengandung pengertian filosofis-kualitatif. Secara filosofis kualitatif, produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan besok harus lebih baik dari pada hari ini (Ananta, 1993:21). Menurut Kuncoro dalam Sukmaraga (2011), adanya keterbelakangan, dan ketertinggalan SDM, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada rendahnya akumulasi modal sehingga proses penciptaan lapangan kerja rendah (tercemin oleh tingginya jumlah pengangguran). Rendahnya akumulasi modal disebabkan oleh keterbelakangan dan seterusnya.

Jumlah pengangguran menurut BPS (2008) adalah jumlah orang yang masuk dalam angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekaerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja cantohnya, seperti ibu

rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

2.6 Tinjauan Teori tentang Pengembangan Desa

2.6.1 Pengertian Pengembangan Desa

Menurut Bambang Ismawan (1985:11), Pengembangan desa adalah suatu upaya untuk memerangi kemiskinan dan keterbelakangan. Pendapat tersebut diperjelas oleh Inayatullah dalam Bambang Ismawan (1985:11), Pengembangan Desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk desa menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya tingkat hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Implikasi untuk mewujudkan pengembangan desa yaitu:

1. Adanya penekanan pada kemampuan menyeluruh dari penduduk desa dalam mempengaruhi lingkungan mereka, dan hal ini dapat dicapai jika pembangunan desa merupakan proses pengembangan kemandirian mereka.
2. Peningkatan pendapatan sebagai akibat peningkatan kemampuan menguasai lingkungan, tidak terbatas pada kelompok kuat di pedesaan melainkan harus merata di antara penduduk.

2.6.2 Pendekatan Pengembangan Desa

Banyak teori yang telah diterapkan dan banyak pula pendekatan dilakukan. Berikut ini ditelaah beberapa teori dan pendekatan pembangunan, yaitu (Ismawan, 1992:4-9):

A. *The Trickle Down Teory*

Teori perembesan atau tetesan ke bawah bercermin pada sejarah ekonomi Inggris dan negara-negara Eropa Barat lainnya yang berorientasikan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Hal ini dapat diartikan bahwa program-program percepatan pembangunan melalui program-program pembangunan yang berpusat pada pertumbuhan ekonomi yang hasilnya disamping dinikmati oleh mereka yang secara langsung terkena sasaran program tersebut, diharapkan bisa juga merembes pada masyarakat yang lebih luas.

B. *Basic Needs Approach*

Pendekatan tersebut meliputi upaya yang secara langsung menanggulangi masalah makanan, gizi, kesehatan, pakaian, pendidikan, dan perumahan melalui penyediaan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan lain, serta Keluarga

Berencana. Kelayakan pendekatan tersebut didasari oleh suatu paket kebijakan yang mengusahakan laju pertumbuhan yang relatif tinggi, pemerataan pendapatan. Adapun dalam batas-batas tertentu juga pemerataan kekayaan, pengaturan kembali pola-pola produksi dan pola konsumsi masyarakat.

C. Pembangunan dari dalam (*development from within*)

Pendekatan ini dalam penanggulangan masalah golongan ekonomi lemah dan masyarakat miskin dilakukan melalui golongan ekonomi lemah itu sendiri atau melalui pembangunan dari dalam. Penerapan pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengefektifkan pelayanan pada kelompok desa yang berarti mengefektifkan bekerjanya *basic communities* yang berorientasi pada pengembangan untuk masa depan. Selain itu, dengan mengembangkan potensi kepercayaan dan kemampuan masyarakat itu sendiri untuk mengorganisir diri serta membangun sesuai tujuan yang mereka kehendaki.

2.6.3 Pembangunan Wilayah Pedesaan

Menurut Madjid Ibrahim dalam Jayadinata (1992), pembangunan wilayah pedesaan pada hakikatnya mengikuti asas pembangunan masyarakat desa (*community development*). Dalam pembinaan masyarakat tersebut, terdapat dua unsur, yaitu pembinaan prakarsa penduduk untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri, dan bantuan dari pemerintah untuk lebih merangsang prakarsa tersebut.

Pembangunan desa di negara agraris umumnya bertujuan memajukan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam kehidupan ekonomi pertanian, wilayah pedesaan memerlukan empat kegiatan ekonomi yaitu (Jayadinata, 1992:71):

- a. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang memproduksi hasilnya
- b. Industri yang menghasilkan barang yang digunakan sebagai masukan dalam pertanian
- c. Industri untuk pengolahan hasil pertanian
- d. Penyaluran hasil pertanian (dan hasil industri pertanian) kepada konsumen

Berhubung dengan hal-hal tersebut, fungsi wilayah pedesaan adalah memproduksi bahan makanan dan bahan mentah bagi industri yang sebagian dapat diolah di tempat (Jayadinata, 1992:71).

Pembangunan dalam wilayah pedesaan dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu (Jayadinata, 1992:72) :

1. Proyek produktif yang langsung, dilaksanakan dalam pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri dan kepariwisataan
2. Proyek produktif dan sosial yang tidak langsung meliputi:
 - a. Perumahan
 - b. Pelayanan sosial dan ekonomi : pendidikan, kesehatan, kebudayaan, agama, rekreasi, dan olah raga, penyediaan ruang terbuka (taman dan sebagainya) administrasi, pertahanan, pasar, dan pertokoan, tempat penggudangan, dan tempat pengolahan hasil
 - c. Utilitas umum (*utility*) : air minum, saluran air limbah, penyediaan energi, dan pengaturan pembuangan sampah
 - d. Pelayanan perhubungan : jalan raya, kereta api, jalur lalu lintas sungai, jembatan, pengangkutan umum, radio, televisi, dan telekomunikasi

2.6.4 Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan

Friedmann dalam Naning Mardinia (2003), pemberdayaan dimaknai sebagai “mendapatkan kekuatan (*power*)” dan mengaitkan dengan kemampuan golongan miskin untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber daya yang menjadi dasar dari kekuasaan dalam suatu sistem maupun organisasi. Pemberdayaan kemudian menjadi pendekatan bagi pembangunan alternatif yang lebih menitikberatkan pada pendekatan *bottom up* dengan menempatkan rakyat miskin sebagai prioritas serta memberikan ruang partisipasi yang besar pada masyarakat. (Mardinia, 2003:128-129)

Model pemberdayaan masyarakat terdiri dari model pembangunan masyarakat lokal, model perencanaan sosial, dan model aksi sosial. Adapun penjelasan dari tiap model dapat dilihat di bawah ini (Mardinia, 2003:130):

a. Model pembangunan masyarakat lokal

Model ini mendasarkan teknik konsensus dan asumsi bahwa dalam masyarakat terjadi kesenjangan relasi dan kapasitas dalam memecahkan masalah secara demokratis. Oleh karenanya, tujuan dari pendekatan ini adalah mengembangkan kemandirian, pengembangan kapasitas dan pengintegrasian masyarakat. Dengan kata lain, tujuan dititikberatkan pada proses. Strategi perubahannya dilakukan melalui pelibatan berbagai kelompok warga dalam menentukan dan memecahkan masalah mereka sendiri.

b. Model perencanaan sosial

Model yang mendasarkan pada perubahan konflik dan konsensus ini berangkat dari asumsi bahwa dalam masyarakat terdapat masalah sosial yang krusial, seperti kesehatan fisik dan mental, perumahan, dan reaksional. Mendasarkan pada asumsi tersebut, tujuan yang ingin dicapai pendekatan ini adalah pemecahan masalah dengan memperhatikan masalah penting yang ada dalam masyarakat.

c. Model aksi sosial

Model yang mendasarkan pada karakteristik taktik konflik dan konfrontasi ini berangkat dari asumsi dasar bahwa dalam masyarakat terjadi proses ketidakberdayaan secara sistematis (*systematic disempowerment people*), berupa pamarjinalisasian, kesenjangan sosial, perampasan hak, dan ketidakadilan.

2.7 Strategi Dasar Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Kementrian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2008 mengelompokkan strategi dasar pembangunan daerah tertinggal untuk mengatasi permasalahan dilakukan melalui empat pilar, yaitu :

- a. **Pilar pertama**, meningkatkan kemandirian masyarakat dan daerah tertinggal, dilakukan melalui:
 1. Pengembangan ekonomi lokal
 2. Pemberdayaan masyarakat
 3. Penyediaan prasarana dan sarana lokal/perdesaan
 4. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat
- b. **Pilar kedua**, mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah, dilakukan melalui :
 1. Penyediaan informasi potensi sumberdaya wilayah
 2. Pemanfatan teknologi tepat guna
 3. Peningkatan investasi dan kegiatan produksi
 4. Pemberdayaan dunia usaha dan UMKM
 5. Pembangunan kawasan produksi
- c. **Pilar ketiga**, memperkuat integrasi ekonomi antara daerah tertinggal dan daerah maju, dilakukan melalui:
 1. Pengembangan jaringan ekonomi antar wilayah
 2. Pengembangan jaringan prasarana antar wilayah
 3. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah

- d. **Pilar keempat**, meningkatkan penanganan daerah khusus yang memiliki karakteristik '*keterisolasian*', dilakukan melalui:
1. Pembukaan keterisolasian daerah (pedalaman, pesisir, dan pulau kecil terpencil)
 2. Penanganan komunitas adat terasing
 3. Pembangunan daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

2.8 Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)

2.8.1 Definisi PEL

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses pengembangan ekonomi yang menitikberatkan pada kebijakan "*endogenous development*" dengan menggunakan potensi lokal (setempat) berupa sumber daya manusia, institusional/kelembagaan, dan sumber daya fisik (Blakely, 1994:50). Untuk menyempurnakan program PEL dalam rangka revitalisasi model PEL dan disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Indonesia, maka PEL adalah usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal dan organisasi masyarakat madani untuk mengembangkan ekonomi pada suatu wilayah (Bappenas, 2007).

2.8.2 Tujuan dan sasaran PEL

Tujuan dan sasaran PEL adalah sebagai berikut (Bappenas, 2007):

1. Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses partisipatif
2. Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara *stakeholder* secara sinergi
3. Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal
4. Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan Usaha Kecil dan Menengah secara ekonomis dan berkelanjutan
5. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
6. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan

7. Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sector dan antar wilayah
8. Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal

2.8.3 Komponen-komponen PEL

Pengembangan dan pertumbuhan ekonomi dapat dianalogikan sebagai pengembangan dan pertumbuhan pada kehidupan tanaman : elemen-elemen utamanya seperti sinar matahari, air, dan nutrisi lainnya harus diberikan pada tumbuhan dalam jumlah yang sesuai untuk tumbuh. Apabila satu elemen tidak ada, maka pertumbuhan tidak akan terjadi, meskipun elemen yang lain diberikan dalam jumlah yang berlebihan. Serupa dengan lima elemen kunci, disingkat 5M, harus dipersiapkan untuk pengembangan ekonomi. Elemen tersebut yaitu *Materials* (Material), *(Hu)manpower* (Sumber Daya Manusia), *Markets* (Pasar), *Management* (Manajemen), *Money* (Uang/modal). Masing-masing harus dipertimbangkan oleh *stakeholders* dalam menyusun rencana pengembangan ekonomi (Blakely, 1994: 146).

Tabel 2.1 Lima Elemen dalam Pengembangan Ekonomi Lokal

<i>Materials</i> (Material)
▪ <i>Land</i> (Lahan)
▪ <i>Buildings</i> (Bangunan)
▪ <i>Location</i> (Lokasi)
▪ <i>Infrastructure</i> (Infrastruktur)
▪ <i>Natural Resources</i> (Sumber Daya Alam)
<i>(Hu)manpower /Labor</i> (Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja)
▪ <i>Skilled personel</i> (personel yang terlatih)
▪ <i>Available workforce</i> (tenaga kerja yang tersedia)
▪ <i>Education and Training capacity</i> (kapasitas pendidikan dan pelatihan)
<i>Markets</i> (Pasar)
▪ <i>Markets Analysis</i> (Analisis Pasar)
➤ <i>Competition</i> (Kompetisi)
➤ <i>Penetration</i> (Penetrasi)
➤ <i>Marketing Strategy</i> (Strategi pemasaran)
<i>Management</i> (Manajemen)
▪ <i>Organizational structure</i> (Struktur Organisasi)
▪ <i>Managers/operators</i> (manajer/operator)
▪ <i>Research and development</i> (R & D) (Penelitian dan Pengembangan)
▪ <i>Marketing and sales</i> (Pemasaran dan Penjualan)
▪ <i>Legal</i> (peraturan/perundang-undangan)
<i>Money</i> (Uang/modal)
▪ <i>Equity/ownership capital</i> (modal perseorangan)
▪ <i>Debt/borrowed funds</i> (pinjaman)
▪ <i>Capitalizing institutions</i> (lembaga permodalan)
▪ <i>Subsidy and substitutes for direct capital</i> (subsidi dan pengganti modal langsung)

Sumber : (Blakely, 1994:147)

Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing elemen-elemen dalam Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), yaitu (Blakely, 1994:147-149):

1. *Materials* (Material)

Material adalah seluruh sumber daya fisik yang ada mencakup sumber daya alam dan fasilitas sumber daya manusia atau infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, sistem distribusi tenaga listrik, dan bangunan. Sumber daya alam meliputi seluruh kondisi atau material yang bermanfaat dan terdapat pada alam seperti tanah, tanah lapang, mineral, iklim, sumber daya air, tanaman dan hewan, dan lokasi geografis. Komunitas harus mengerti hal itu meskipun sumber daya ini terbatas dalam jumlah dan ketersediaannya, namun dapat dikombinasikan dalam beberapa cara untuk memproduksi barang dan jasa yang lebih bervariasi. Meskipun keberadaan material dapat membatasi tipe barang yang diproduksi di sebuah kawasan, bagaimanapun juga, keberadaan sumber daya tersebut harus dipelajari sebelum diberikan perhatian untuk produk potensial dan proses memproduksinya sebagai upaya untuk menyediakan lapangan kerja.

2. *(Hu)manpower* (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia menggambarkan tenaga kerja yang digunakan dalam membuat barang atau jasa untuk dijual. Seperti contoh, tenaga kerja meliputi orang yang mengoperasikan mesin, memperbaiki mesin, mengawasi proses, atau mengirim barang yang telah diproduksi. Keterampilan khusus dibutuhkan pada tahap proses yang berbeda dan keterampilan diperoleh melalui pengalaman atau pelatihan. Kuantitas keterampilan merupakan investasi yang memberikan hasil jelas dalam bentuk peningkatan produktivitas. Tenaga kerja yang terlatih dan berpengalaman akan lebih disiplin, membuat sedikit kesalahan, dan lebih inovatif. Keterampilan tenaga kerja merupakan aset dan dapat dijadikan sebagai *human capital* dalam proses pengembangan ekonomi.

Jumlah *human capital* yang tersedia untuk bekerja pada suatu kawasan tergantung pada ukuran populasi bekerja dan penduduk yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk bekerja. Kemauan bekerja tergantung pada latar belakang sosial budaya tiap individu, jenis pekerjaan yang ada, dan upah yang berlaku. Kemampuan bekerja tergantung pada umur dalam populasi dan tingkat pendidikan dan pelatihan. Ketersediaan sumber daya manusia di suatu kawasan merupakan sumber daya yang penting.

3. *Markets* (Pasar)

Pasar adalah suatu tempat dimana terdapat permintaan untuk barang atau jasa tertentu. Ukuran permintaan tergantung pada jumlah orang atau organisasi yang

menginginkan produk tersebut, kualitas produk, harga yang ditawarkan, dan kemampuan untuk menginformasikan kepada konsumen tentang kualitas, harga, dan ketersediaan produk. Area pasar dari suatu produk tidak tetap. Perubahan pada karakteristik populasi, perekonomian lokal dan internasional, atau hanya terdapat perubahan umum pada nilai sosial dan sikap dapat mempengaruhi potensi konsumen. Serupa dengan hal tersebut, metode baru dalam mengkomunikasikan harga dan karakteristik produk yang berpotensi untuk permintaan baru. Pasar baru dapat dibentuk dengan penetapan harga produk yang lebih baik, transportasi yang memadai, teknik produksi yang lebih baik, dan penetrasi yang lebih pada pasar lokal atau luar negeri. Intinya bahwa pasar secara normal sangat fleksibel dan dapat diperluas melalui imajinasi dan kerja keras. Mengidentifikasi konsumen yang potensial, mengetahui macam produk apa yang mereka inginkan dan berapa harganya, dan mampu menginformasikan ketersediaan produk pada mereka merupakan contoh penggunaan area pasar untuk hasil yang maksimum.

4. *Management* (Manajemen)

Manajemen merupakan tipe dari *human capital* yang spesial. Manajer yang baik adalah seseorang yang mampu mengkombinasikan material, uang/modal, dan personel dengan tujuan untuk memproduksi dan memasarkan produk dengan sukses. Tanpa manajemen yang efektif, pengembangan ekonomi tidak akan terjadi. Manajer yang paling efektif juga cenderung menjadi pemikir, pengambil resiko, dan innovator, motivator dan juga koordinator.

Pengembangan ekonomi merupakan proses beraneka segi dan untuk menjadi sukses, harus terdapat koordinasi yang efektif antara pemerintah dan industri sama baiknya antara agen yang bervariasi dan tingkatan pemerintah. Hal yang paling penting, komunitas atau masyarakat lokal harus menyediakan dukungan dan keterlibatannya. Hubungan yang sukses antar kelompok berbeda membutuhkan talenta manajemen yang tinggi pada sektor publik dan private dalam ekonomi. Pemerintah lokal atau initiator yang lain dalam program pengembangan ekonomi didesain untuk menstimulasi tenaga kerja untuk mempunyai keterampilan khusus dalam menemukan cara untuk berkontribusi pada ketersediaan dan penggunaan talenta manajemen yang efektif.

5. *Money* (Uang/Modal)

Uang/modal merupakan pembiayaan secara langsung yang menyangkut dalam pembuatan dan pengoperasian proyek yang dimaksud. Uang merupakan sesuatu yang diperlukan untuk permulaan proyek pengembangan ekonomi dengan tujuan untuk

penyediaan kebutuhan fasilitas, untuk membayar dan melatih staff, untuk membayar material jika produk dihasilkan melalui pabrik, untuk membayar biaya transport produk, dan untuk pemasaran barang atau jasa.

Ketika penyediaan kebutuhan suatu elemen atau komponen tersebut tidak ada untuk proyek sukses, uang digunakan untuk membeli, menyewa, mengorganisasikan, dengan cara yang lain untuk menyediakan elemen. Contohnya dana yang digunakan untuk memperoleh kegunaan bangunan, konsultan manajemen atau akuntan, pelatihan pekerja untuk keterampilan khusus, atau pemeliharaan jalan. Dana untuk kebutuhan komponen proyek diperoleh dari sumber daya publik atau private, dan komponen itu sendiri disediakan oleh agen publik atau private.

2.8.4 Penyusunan Strategi PEL

Hal ini terdapat empat strategi pendekatan. Strategi tersebut terdiri dari :

a. Strategi Pengembangan Lokalitas/Fisik

Melalui pengembangan program perbaikan kondisi lokalitas/fisik yang ditujukan untuk kepentingan industri/komersial, pemerintah lokal mempunyai pengaruh positif pada pengembangan bisnis lokal. Jika jumlah pelayanan sumber daya alam dan manusia telah menguntungkan, kelompok komunitas dapat juga memutuskan untuk memperbaikinya karena manajer dan usahawan berpotensi sering mengambil pertimbangan terhadap kenyamanan dalam peningkatan kualitas hidup. Secara khusus tujuan strategi pembangunan lokalitas/fisik ini adalah untuk menciptakan identitas daerah, memperbaiki tingkat kenyamanan atau kualitas hidup masyarakat, dan memperbaiki daya tarik pusat dalam usaha untuk memperbaiki bisnis lokal. Alat untuk mencapai tujuan pengembangan lokalitas/fisik daerah, mencakup antara lain (Blakely, 1994:155):

1. Pembuatan bank tanah (*land banking*)
2. Pembangunan infrastruktur untuk kawasan industri dan/atau perdagangan
3. Pembangunan yang spekulatif
4. Pengendalian tata ruang/ *zoning regulation*
5. Pengendalian perencanaan dan pembangunan
6. Perencanaan pariwisata
7. Penataan kota/ *town scapping*
8. Perbaikan perumahan dan permukiman
9. Pelayanan publik

b. Strategi Pengembangan Bisnis/Dunia Usaha

Pengembangan bisnis merupakan komponen yang penting dalam perencanaan ekonomi lokal karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan bisnis adalah cara terbaik dalam menciptakan dan memperbaiki perekonomian lokal yang sehat. Alat untuk mencapai tujuan pengembangan lokalitas/fisik daerah, mencakup antara lain (Blakely, 1994:178) :

1. Penciptaan iklim usaha yang baik
2. Pembuatan pusat informasi terpadu
3. Pengusahaan permodalan melalui lembaga-lembaga permodalan dan bank
4. Pengembangan pusat pelatihan manajemen, konsultasi, pelayanan riset untuk pengembangan usaha kecil
5. Pembuatan sistem pemasaran bersama
6. Pengembangan dunia usaha bagi kaum wanita
7. Pengembangan program dan promosi pariwisata
8. Pengembangan usaha mikro
9. Pembuatan lembaga riset dan pengembangan
10. Menentukan zona bisnis atau dunia usaha
11. Pengembangan aktivitas-aktivitas kewirausahaan

c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

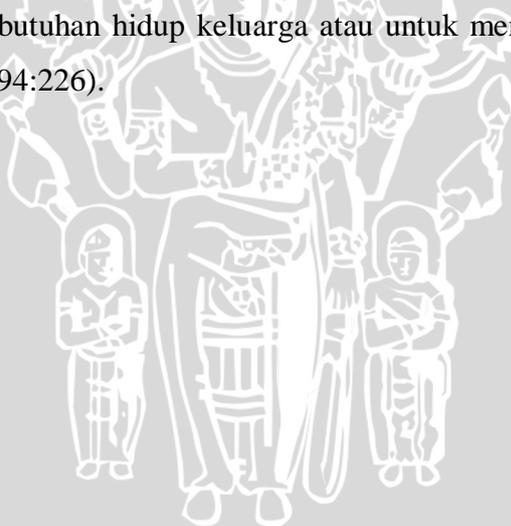
Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengembangan ekonomi. Pilihan strategi ini menekankan hubungan antara tenaga kerja yang dibutuhkan dalam segmen tertentu pada masyarakat lokal dan proses penciptaan tenaga kerja. Tujuannya adalah untuk mengubah sistem sumber daya manusia dengan cara meningkatkan peluang pekerjaan yang baik untuk pengangguran dalam suatu komunitas. Metode yang digunakan antara lain adalah (Blakely, 1994: 206):

1. Sinkronisasi sasaran program pengembangan sumber daya manusia yang akan dijalankan
2. Pelatihan dengan konsep *customized training* untuk menciptakan tenaga kerja yang diharapkan (memenuhi persyaratan) dunia usaha
3. Persetujuan antara pemerintah lokal dengan dunia usaha untuk menggunakan tenaga kerja lokal
4. Pengelolaan tenaga kerja yang baik
5. Pembuatan bank skill (*skill bank*) yang memberikan informasi secara tepat dan akurat tentang tenaga kerja yang dibutuhkan

6. Mengadakan program-program pelatihan
7. Menciptakan iklim yang mendukung bagi pelatihan dan pendidikan untuk tenaga kerja
8. Pengembangan keterampilan bagi penyandang cacat

d. Strategi Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pengembangan pemberdayaan masyarakat merupakan aktivitas yang bertujuan melayani komunitas sosial tertentu pada suatu daerah. Pengembangan pemberdayaan masyarakat merupakan elemen penting dalam strategi pengembangan ekonomi lokal secara lebih luas. Secara umum, mempunyai sasaran sosial yang kuat dalam menyokong ekonomi. Mereka membutuhkan niat dan motivasi (kelompok, individu, lokalitas) dalam menemukan dan memanfaatkan peluang ekonomi. Mereka mengusahakan struktur dan sumber daya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada tingkat hubungan ketetanggaan. Mereka menyediakan akses peluang kerja untuk masyarakat lokal yang menemukan kesulitan dalam memasuki sistem ekonomi. Tujuan dalam pengembangan ini yaitu menghasilkan manfaat sosial misalnya melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga atau untuk memperoleh keuntungan dari usahanya (Blakely, 1994:226).



2.9 Studi Terdahulu

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Tujuan	Variabel	Unit Analisis	Analisis	Hasil	Perbedaan dengan studi ini
1.	Pengembangan desa tertinggal di Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo (Studi kasus Desa Kupang) (Narya Tantri Ayu Dewani, 2010)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi karakteristik Desa Kupang sebagai salah satu desa tertinggal di Kecamatan Jabon • Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan Desa Kupang di Kecamatan Jabon • Menyusun strategi dan arahan pengembangan Desa Kupang dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik fisik desa tertinggal • Karakteristik perekonomian • Karakteristik sosial budaya 	Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis Karakteristik Desa Tertinggal • Analisis Potensi Masalah • Analisis Akar Masalah • Analisis <i>Photomapping</i> • Analisis faktor • Analisis SWOT • Analisis EFAS-IFAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan desa tertinggal • Arahan pengembangan desa tertinggal 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan dengan studi ini yaitu terdapat pada variabel yang digunakan untuk menentukan faktor penyebab ketertinggalan desa
2.	Studi Kemiskinan dalam Perspektif Masyarakat Miskin Desa Tertinggal di Kabupaten Sampang (Syarif Iman Hidayat, 2008)	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis pandangan orang miskin terhadap kemiskinan yang dirasakan mereka • Menganalisis persepsi masyarakat miskin desa tertinggal terhadap berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemiskinan 	Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis persepsi masyarakat dengan skala likert • Analisis statistik Uji Non Parametrik Chi-Square 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbedaan Indikator kemiskinan menurut masyarakat pada tiap lokasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Merupakan studi komparatif yaitu membandingkan antara indikator kemiskinan menurut pemerintah dan masyarakat desa tertinggal. Setelah itu mengujinya dengan analisis statistik Uji Non Parametrik Chi-Square
3.	Analisis Masalah Kemiskinan Nelayan Tradisional di Desa Padang Panjang	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor kualitas sumber daya manusia • Faktor 	Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis deskriptif evaluatif terhadap faktor-faktor penyebab dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor penyebab kemiskinan desa • Bentuk kemiskinan desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan arahan atau konsep pengembangan untuk wilayah studi di masa

No.	Judul	Tujuan	Variabel	Unit Analisis	Analisis	Hasil	Perbedaan dengan studi ini
	Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya, Nanggroe Aceh Darussalam (Musawwir, 2009)	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui bentuk kemiskinan nelayan tradisional di Desa Padang Panjang 	<ul style="list-style-type: none"> Ekonomi Faktor hubungan kerja nelayan Faktor kelembagaan 		bentuk kemiskinan di wilayah studi		depan.

